



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 15 Juni 2024

Halaman: 5

## TERAS

### Memilih Khatib

JAJARAN Kementerian Agama (Kemenag) di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mau kecewakan lagi dengan polemik khotbah yang berbau politis. Setelah viral dengan polemik khotbah menjurus politis saat Salat Idul Fitri beberapa waktu lalu di Bantul, kini Kemenag berupaya melakukan pencegahan dini untuk menangkis hal serupa saat Salat Idul Adha pada 17 Juni 2024. Pasalnya, tahun ini seluruh kabupaten/kota di DIY secara serentak akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Video khotbah bermuatan politis di Bantul sebelumnya viral karena menyinggung soal Pilpres 2024. Sang khatib kala itu, mencurigai ada kecurangan dalam Pilpres hingga menguntungkan salah satu pasangan calon. Jemaah yang awalnya mendengarkan khotbah dengan khushyuk akhirnya memilih meninggalkan lokasi tempat Salat Id dengan kekecewaan. Selang beberapa waktu, sang khatib meminta maaf karena melakukan kecerobohan dalam pemilihan tema khotbah Salat Idul Fitri.

Melihat situasi ini, Kementerian Agama Kota Yogyakarta siap menerjunkan penyuluh agama Islam untuk bertugas sebagai imam dan khatib untuk pelaksanaan Idul Adha 1445 Hijrah. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan panitia hari besar yang belum memiliki imam dan khatib untuk Salat Idul Adha. Kemenag mengimbau agar panitia Salat Id bisa memilih, menyeleksi imam dan khatib yang bisa membangun suasana agar lebih kondusif. Apalagi saat ini masih di tahun politik, termasuk Pilkada serentak.

Di sisi lainnya, Kemenag juga menggelar Basic Training Singkat Juru Sembelih Halal (Juleha) bagi takmir masjid dan musala di seluruh wilayah di DIY. Pelatihan ini sebagai upaya meningkatkan kualitas dan pemahaman penyembelihan hewan berkaki empat agar sesuai dengan syariat Islam, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha 2024. Basic Training Juleha digelar untuk menekankan pada pentingnya prinsip-prinsip halal dalam pemotongan hewan berkaki empat. Dengan harapan, takmir masjid dan musala menjadi lebih paham.

Takmir masjid dan musala perlu mendapatkan pelatihan karena biasanya menjadi garda terdepan dalam kegiatan penyembelihan hewan kurban. Namun demikian, masyarakat juga dapat memanfaatkan rumah pemotongan hewan (RPH) yang buka hingga hari tasyrik. Selain mengedepankan syariat, penyembelihan hewan kurban di RPH terjamin dari sisi higienitas serta kesehatan hewan kurban karena harus mendapat surat keterangan sehat dari dinas berwenang.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005